

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Choerudin, Zulfachry, Rahmatya Widyaswati, Lady Diana Warpindyastuti, Jana Siti Nor Khasanah, Budi Harto, Nita Fauziah Oktaviani, Muhammad Irfai Sohilaui, Lucky Nugroho, Judi Suharsono, V. Santi Paramita, *Literasi Keuangan*, (Kota Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Agustinus Sihombing, Ranat Mulia Pardede, Fahmi Amrico, Herman, Eko Murti Saputra, Armansyah, and Heru Iskhan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Keempat).
- Douglas E. Edlin *Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*. (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008).
- Esther Masri, Oti Handayani, & Rama Dhianty. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023)
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Kinerja OJK Triwulan II - 2024*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
- Rengga Kusuma Putra, Aziz Widhi Nugroho, Satriya Nugraha, Naili Azizah, Retno Eko Mardani, Fahmi Ramadhan Firdaus, Miasiratni, Dian Karisma, Gokma Toni Parlindungan, *Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia*, (Kota Tangerang: PT Adikara Cipta Aksa, 2025).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Radjawali, 1985).

Wiwik Sri Widiarty. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan*. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Jurnal

Adrian Conrad Oemardi dan Amoury Adi Sudiro, "Peran Pemerintah dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Layanan Pinjaman *online*", *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, 345-360.

Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilla, & Miftahul Fikri. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal*, 2022, 48-74.

Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni, & Harry Murty. "Perlindungan bagi Konsumen pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif." *Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>, 1-22.

Aris Roistar Sagala, Martono Anggusti, dan Debora, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman *online*", *Nommensen Journal of Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, 268-288.

Azhar Hafizhuddin, Faren Zahra Arimbi, Kevin, Muhammad Najmi Mafaza H., "Etika dan Moral dalam Konteks Pelayanan *platform* Pinjaman *online*", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 14, 311-317.

Azizah Shodiqoh Rafidah K.K. dan Happy Novasila Maharani, "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0", Vol. 08, No. 01, 2024, 1-14.

Bhenu Artha, Utami Tunjung Sari, Niken Permata Sari, Ardhi Khairi, Bahri, Tien Suhartini, "Keuangan digital: Suatu Studi Literatur", *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, Vol. 4, No. 1, 2023, 84-91.

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif

- Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023, 13-19.
- Dinda Faradila dan Abdur Rafik, "Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman *online*/P2P *lending* pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia", Selektta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, Vol. 2, No. 3, 2023, 63-76.
- Edward Zeth Daud, & Heru Suyanto. "The Legal Protection on Consumers of E-Commerce Transactions in Indonesia." Law Development Journal, Vol. 6, No. 2, 2024, 266-278.
- Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *online* Ilegal di Indonesia", UNES Law Review, Vol. 4, No. 3, 2022, 283-296.
- Fajar Muazamsyah, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Financial Technology (Peer to Peer *lending*)", As-Syar'I: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 3, 2024, 1119-1138.
- Firman Farid, Ruslan Renggong, Andi Tira, "Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Penagih Utang dalam Perspektif Kriminologi", Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 7, No.1, 2024, 33-38.
- Gilang Putra, and Kayus Kayouwan Lewoleba. "Menyikapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia." Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 3, 2024, DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>, 306-315
- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat", Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis, Vol. 11, No. 1, 2022, 80-91.
- Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer *lending* sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, 189-198.
- I Putu Agus Putra Arimbawa & I Gede Pasek Eka Wisanjaya. "Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Belanja *online*." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol. 3, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3445>, halaman 371–383.
- Iip Aripah, "Penerapan Asas Keadilan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata", Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum, dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2023, 70-77.

- Jeane Neltje, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, 2034-2039.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman *online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *online*", *IPHMI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, 73-87.
- Jerry Coakley, Winifred Huang, "P2P *lending* and Outside Entrepreneurial Finance", *The European Journal of Finance*, Vo. 29, No. 13, 2020, 1520-1537.
- Kurniawan Arif Maspul dan Nugrahani Kartika Putri, "Big Data and Predictive Analytics for Indonesia's Economic Transformation and Digital Resilience", *Journal of Technology and System Information*, Vol. 2, No. 2, 2025, 1-22.
- Lyria Bennett Moses, "Recurring Dilemmas: The Law's Race to Keep Up with Technological Change", *Journal of Law, Technology & Policy*, 2007, 239-285.
- Megawati Simanjuntak, Arif Safari, dan Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman *online* di Masa Pandemi COVID-19", *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, Vol. 4, No. 1, 2022, 234-239.
- Mirza Agung Rahmatullah dan Muh. Afif Mahfud, "Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencegahan Perkembangan *platform Money Game* di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 12, No. 1, 2024, 31-42.
- Ni Made Martini Puteri, Mamik Sri Supatmi, Reni Kartikawati, Bhakti Eko Nugroho, Agustin Dea Prameswari, Ni Nyoman Sri Natih, Putri Ramadhani, Natasya Hana Rumondang, "Women, Risks, and Consumer Protection in *online lending platforms* in Indonesia: A Study of the Multiple Vulnerabilities of Women as Users and Its Impact to Gender-Based Violence", Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024.
- Pristiwantono Hani, "Transformasi Digital Marketing di Era AI: Tinjauan Literatur tentang Tren, Strategi, dan Dampaknya pada Konsumen Modern", *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 7, No. 6, 2024, 8507-8628.
- Puteri Hikmawati, "Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman *online* Ilegal", *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 13, No. 17, 2021, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, "Illegal *online* Loan (*Pinjol*) in Indonesia: Ethical and Human Rights Perspectives", *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, 58-76.
- R.F. Southby, & B. del Pozo. "Challenges and Opportunities in Educating Law Enforcement Officers: 2020 and Beyond." In *Law Enforcement and Public Health*, edited by I. Bartkowiak-Théron, J. Clover, D. Martin, R.F. Southby, and N. Crofts, 2022. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-83913-0_5, 65-73
- Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer *lending* dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2021, 37-61.
- Sharda Abrianti, Anna Maria Tri Anggraini, dan Ignatius Pradipta Probondaru, "Daman Pinjaman *online* bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, 10420-10431.
- Sindy Aulia Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Uang Digital: Potensi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global", Vol. 2, No. 12, 2024, 259-267.
- Suwinto Johan, Zein Khuzaimah, Marella Ng, "Transformasi Lembaga Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, Vol. 8, No. 1, 2024, 11-16.
- Syaiful Khoiri Harahap. "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 2, 2024, 1018-1034.
- Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State", *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 3, 2022, 270-283.
- Waldi Nopriansyah dan Neysa Salma Wafi, "Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman *online* Ilegal bagi Mahasiswa", *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2024, 421-432.
- Yuliana Safitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, 860-867.
- Yusuf Arif Utomo, "Legal Protection for Problem Debtor Related to the use of the Artificial Intelligence System in Peer to Peer *lending*", *Yuridika*, Vol. 35, No. 3, 2020, 657-676.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 1/POJK.07/2013. LN 118. TLN 5431.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, LN No. 324.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 31/POJK.07/2020, LN No. 123, TLN No. 6507.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 10/POJK.05/2022, LN No. 2/OJK, TLN No. 2/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 22 Tahun 2023, LN No. 40/OJK, TLN No. 62/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, POJK No. 11 Tahun 2024, LN No. 18/OJK, TLN No. 86/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 40/POJK.5/2024, LN No. 53/OJK, TLN No. 121/OJK.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN No. 185, TLN No. 6400.

Surat Keterangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tentang Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020, SK AFPI No. 002/SK/COC/INT/IV/2020.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, SE OJK Nomor 19/SEOJK.6/2023.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Undang-Undang Dasar. UUD NRI 1945.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. LN 22. TLN 3821.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 Tahun 2011. LN 111. TLN 5253.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251, TLN No. 5952.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 1 Tahun 2024. LN 1. TLN 6905.

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022. LN 196. TLN 6820.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023, LN No. 4, TLN No. 6845.

Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. 2021.

Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 274/PDT/2023/PT.DKI/ Jo. Nomor: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. 2023..

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Kasasi Nomor: 1206 K/Pdt/2024. 2024.

Website/Internet

Ade Ridwan Yandwiputra, “LBH Jakarta: Putusan MA Buktikan Negara Gagal Lindungi Warga dari Praktik Pinjol”, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/lbh-jakarta-putusan-ma-buktikan-negara-gagal-lindungi-warga-dari-praktik-pinjol-36550> pada tanggal 9 Juni 2025

Advenia Elisabeth, “Terima 4.998 Aduan Konten Pinjol Ilegal, Kominfo Sebut Kesulitan Ada di Server Luar Negeri”, diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/terima-4998-aduan-konten-pinjol-ilegal-kominfo-sebut-kesulitan-ada-di-server-luar-negeri> pada tanggal 9 Juni 2025.

Budi Prihantoro, “Warga Menang Gugatan: MA Perintahkan Perketat Aturan Pinjol”, diakses dari <https://www.rri.co.id/hukum/856179/warga-menang-gugatan-ma-perintahkan-perketat-aturan-pinjol>, 2024

Ervana Trikarinaputri, “OJK Cabut Izin Usaha 4 Penyelenggara Fintech *lending* Selama 2024, Termasuk TaniFund dan Investree”, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-cabut-izin-usaha-4-penyelenggara-fintech-lending-selama-2024-termasuk-tanifund-dan-investree-1203033> pada tanggal 9 Juni 2025.

Hikmat Raharjo Oetomo, “Ratusan Nomor *debt collector* Diblokir”, diakses dari <https://www.rri.co.id/bali/keuangan/1288898/ratusan-nomor-debt-collector-diblokir> pada tanggal 9 Juni 2025.

Imamatul Silfia, “OJK terima 7.183 pengaduan pinjol hingga Februari 2024”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3994881/ojk-terima-7183-pengaduan-pinjol-hingga-februari-2024> pada tanggal 9 Juni 2025.

Khoirifa Argisa Putri, “OJK Sebut Penggantian Kerugian Konsumen oleh PUJK Mencapai Rp212,7 Miliar”, diakses dari <https://infobanknews.com/ojk-sebut-penggantian-kerugian-konsumen-oleh-pujk-mencapai-rp21217-miliar/> pada tanggal 9 Juni 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Self Help Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman *online* & Kekerasan Berbasis Gender-*online*”, diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/self-help-kit-bagaimana-anda-mengatasi-permasalahan-utang-pinjaman-online-kekerasan-berbasis-gender-online/> pada tanggal 9 Juni 2025.

Maria Fransiska Dewi, “OJK: Kerugian Masyarakat Karena Investasi Ilegal Capai Rp139 T”, diakses dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/13212/ojk-kerugian-masyarakat-karena-investasi-ilegal-capai-rp139-t/2> pada tanggal 7 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Menghormati Putusan Mahkamah Agung dan Terus Perkuat Pengaturan dan Pengawasan Fintech P2P *lending*”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Menghormati-Putusan-Mahkamah-Agung-dan-Terus-Perkuat-Pengaturan-dan-Pengawasan-Fintech-P2P-lending.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech *lending* Berizin di OJK per 31 Januari 2025”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>, diakses pada 10 Mei 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas PASTI Blokir 1.001 Entitas Ilegal di Juni-Juli 2024”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info->

terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-1001-Entitas-Ilegal-di-Juni-Juli-2024.aspx pada tanggal 9 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Desember-2024.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025.

Pernita Hestin Untari, “OJK Beri 661 Sanksi dan Cabut Izin 4 P2P *lending* sepanjang 2024”, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20250203/563/1836448/ojk-beri-661-sanksi-dan-cabut-izin-4-p2p-lending-sepanjang-2024> pada tanggal 9 Juni 20-25.

Rizka Khaerunnisa, “OJK hentikan 3.240 entitas keuangan ilegal sepanjang 2024”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4569906/ojk-hentikan-3240-entitas-keuangan-ilegal-sepanjang-2024> pada tanggal 9 Juni 2025.

Satgas PASTI, “Daftar Pinjaman *online* Ilegal”, Lampiran I Siaran Pers 21 Maret 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Fokus Penguatan Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan di Industri Pindar” diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Fokus-Penguatan-Pengawasan-dan-Penyelesaian-Permasalahan-di-Industri-Pindar.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Regulatory Sandbox”, diakses dari <https://ojk.go.id/en/fungsi-utama/itsk/regulatory-sandbox/default.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025

Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal di September 2024”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx> pada tanggal 9 Juni 2025.

Tempo.com, “Dorong Fintech *lending* Danai UMKM, OJK: Kontribusinya ke PDB 60 Persen”, <https://www.tempo.co/ekonomi/dorong-fintech-lending-danai-umkm-ojk-kontribusinya-ke-pdb-60-persen-166881>, diakses 10 Mei 2025.

Tesis

Ditya Putri Wulansari, Taufik Yahya, dan Rosmidah, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Pinjaman *online* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia”, Tesis, Kota Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.

Sherly Kurnaini, “Pertanggungjawaban Perdata Kreditur atas Penyalahgunaan Data Pribadi yang Merugikan Debitur dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman *online*”, Tesis, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024.

Disertasi

Pujiyono. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Disertasi., (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019)

